

PERANAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA DI KELURAHAN KADIDI KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Ahyar
ahyar@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Peranan Pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Peranan Pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian ini sebanyak 1264 generasi muda, sedangkan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin dimana sampel yang diambil berjumlah 93 pemuda. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik (1) Observasi, (2) Wawancara (3) Kuisisioner, dan (4) Studi Pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator peranan pemerintah terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 69,25 % kategori berperan, indikator Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 70 % dengan kategori berperan, indikator pemberdayaan generasi muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 68,6 % dengan kategori berperan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Pemerintah terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 69 %, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 69,67 % dengan kategori berperan.

Kata Kunci : Peranan, Partisipasi, dan pemberdayaan

Abstract

The purpose of research is to determine the role of government and public participation in the Empowerment of Youths in Sub Kadidi District of Panca Chert Sidenreng Rappang, and to determine the factors that affect the role of government and public participation in the Empowerment of Youths in Sub Kadidi District of Panca Chert Sidenreng Rappang The population of this study were 1264 young people, while the sample using the formula Slovin where samples are taken amounted to 93 youth. Data collection techniques used in this research is to use the technique (1) observation, (2) Interviews (3) questionnaire, and (4) Study Library. The collected data was then analyzed using frequency tables and percentages. The results of this study indicate that the indicator of the government's role in the Village Youths Empowerment Kadidi District of Panca Chert Sidenreng Rappang with a value of 69.25% instrumental categories, indicators of the Empowerment Community Participation Youths in Sub District of Panca Chert Kadidi Sidenreng Rappang with a value of 70% the instrumental categories, indicators of empowerment of youth in the Village District of Panca Chert Kadidi Sidenreng Rappang with a value of 68.6% to the category of acts and the factors that influence the Government's role in the Village Youths empowerment Kadidi District of Panca Chert Sidenreng Rappang with a score of 69 %, and the factors that influence the participation of the community in the Village Youths Empowerment Kadidi District of Panca Chert Sidenreng Rappang with a value of 69.67% with a role category.

Keywords: Role, Participation, and Empowerment

A. PENDAHULUAN

Generasi muda pada semua zaman dan tempat memegang peranan yang signifikan. Tak heran apabila kemudian generasi muda menjadi pilar dari kokoh tidaknya sebuah Negara. Dinamika yang ada memberikan gambaran bahwa generasi muda memberikan kontribusi yang besar terkait dengan perubahan dan proses pembangunan yang ada. Sejak era Pergerakan Nasional hingga Orde Reformasi, generasi muda menjadi motor penggerak perubahan, sekaligus memastikan bahwa proses perubahan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman, dalam konteks pembaruan dan pembangunan bangsa. Dalam rancangan Undang Undang tentang kepemudaan, definisi pemuda menunjuk kepada orang yang berusia 18 sd. 35 tahun. Tentu penetapan margin usia ini lebih dahulu telah melampaui kajian akademis untuk mendapatkan rumusan yang tepat bagi kondisi demografi kepemudaan di tanah air.

Proses pencapaian cita-cita pembangunan merupakan kewajiban bersama semua warga negara, tidak dibatasi oleh profesi, usia, jabatan, dan pranata sosial lain. Dalam hal ini pemuda sebagai bagian dari warga negara mempunyai kewajiban yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, mengingat pemuda adalah intelektual muda yang mempunyai kapabilitas. Peranan pemuda dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia memang bersifat dominan dan monumental. Di era pra-kemerdekaan maupun di era kemerdekaan, pemuda selalu tampil dengan jiwa kepeloporan, kejuangan, dan patriotismenya dalam mengusung perubahan dan pembaharuan. Karya-karya monumental pemuda itu dapat ditelusuri melalui peristiwa bersejarah antara lain; Boedi Oetomo (20 Mei 1908) yang kemudian diperingati sebagai Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945), transisi politik 1966, dan Gerakan Reformasi 1998. Akan tetapi, harus disadari bahwa pada konteks tertentu generasi muda tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri, namun membutuhkan stimulasi agar arah geraknya dapat berjalan dengan baik. Sebab, harus diakui bahwa di satu sisi generasi muda memiliki semangat yang menggelora untuk melakukan berbagai aktifitas positif bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain terdapat berbagai godaan yang dapat mengendorkan dan membelokkan

tujuan yang telah dirumuskan ke arah yang tidak baik. Dan pada kelanjutannya akan mempengaruhi arah gerak bangsa.

Hasil observasi penulis tanggal 21 Desember 2015 menemukan masalah di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu kurangnya peranan pemerintah kelurahan dan partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan generasi muda, contoh kurangnya lapangan kerja/kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran/setengah pengangguran di kalangan generasi muda. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik meneliti tentang "Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang".

(Soekanto, 2002), Peranan merupakan aspek dinamisi kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. menyatakan bahwa peranan adalah keseluruhan hubungan perilaku seseorang dilihat dari fungsi organisasi. Sedangkan (Soekanto, 2002), memberikan pengertian tentang peranan, peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua hal arti, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan dapat di artikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam sesuatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang di namis dari suatu kedudukan (status). Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004),

(Saparin, 2006), faktor-faktor yang memengaruhi peranan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Keturunan yang dimaksud disini adalah sosok pemimpin yang berasal dari keluarga baik-baik sehingga ia bisa memperoleh pengakuan masyarakat akan keberadaannya dalam masyarakat.
2. Kewibawaan adalah sebagai kekuatan yang terpancar dalam diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.
3. Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian. Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh (Fasli Djalal, 2001), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Rumusan FAO yang dikutip Mikkelsen (2001:64) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut.

(Tilaar, 2009), mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

(Totok, 2015), Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat

terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya. (Adi, 2007), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi Masyarakat menurut (Totok, 2015), adalah

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan pembinaan perlu dilakukan dengan mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap pembangunan masa depan, sehingga akan meningkatkan pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan merupakan seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat menyumbangkan dana kepada generasi muda untuk kegiatan kepemudaan dalam bidang olah raga misalnya pertandingan bola voli.
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan dalam pengembangan generasi muda.
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah merupakan tujuan utama generasi muda perlu mendapatkan perhatian khusus dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kelurahan yang memungkinkan pelaksanaan fungsionalnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya melalui usaha-usaha pencegahan, pelayanan dan pengembangan sosial.

(Ketaren, 2008), pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu", prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "*demand*") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

(Totok, 2015), Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

(Ali, 2009) "Muda diartikan belum sampai setengah umur, belum cukup umur". Maka dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pengertian muda itu difokuskan pada usia dengan batas tertentu penggolongannya seperti pada anak-anak dan remaja". Sedangkan menurut (Daljoeni, 1998), pengertian generasi adalah: "Keseluruhan individu dalam masyarakat yang sebaya, sebagai akibat pengalaman yang mirip dan keterikatan yang sama, bersikap kritis terhadap generasi di atasnya".

Generasi muda adalah golongan manusia-manusia muda yang masih

memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pengembangan yang kini telah berlangsung. Pemuda Indonesia dewasa ini sangat beraneka ragam, terutama bila dikaitkan dengan kesempatan pendidikan. Sebenarnya tidak ada definisi normatif dan baku untuk menunjuk siapa yang masuk ke dalam kategori pemuda karena dipengaruhi oleh situasi sosial, budaya, ekonomi dan politik tempat 'pemuda' berada. Dalam suatu penelitian sebutan pemuda yang diberikan kepada seseorang ditentukan melalui penunjukan dan pengakuan dari orang-orang yang hidup dalam suatu wilayah tempat tinggalnya. Oleh karena itu, sebagai pemuda yang ditunjuk dan diakui oleh sesama warga, mereka bisa terdiri atas orang-orang yang belum atau sudah menikah karena status pernikahan tidak dipertimbangkan.

Indikator pemberdayaan Generasi Muda menurut (ed, 2004), yaitu:

1. Pelatihan: Pelatihan melibatkan segenap generasi muda untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera menggunakannya dalam mencari pekerjaan.
2. Penyuluhan: Penyuluhan adalah penyampaian informasi kepada generasi muda terkait dengan program kerja sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan program.
3. Kebijakan: Ultimatum atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait untuk mengatur program kerja generasi muda, kebijakan ini bisa berupa bantuan modal, kelengkapan sarana dan prasarana untuk membuka usaha.
4. Melakukan penguasaan kapasitas. dalam konteks ini generasi muda perlu dibekali keterampilan melalui pelatihan-pelatihan yang produktif.
5. Meningkatkan partisipasi atau inisiatif generasi muda untuk hidup mandiri dan menghilangkan budaya ketergantungan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tiga variabel, yaitu variabel pertama yakni peranan pemerintah, variabel kedua yakni partisipasi masyarakat dan variabel ketiga yakni pemberdayaan generasi muda. Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan, dan Kuesioner, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah

Kualifikasi penilaian diambil berdasarkan lima tingkat pembagian, Rentang Persentase menurut pendapat (Sugiyono, 2011), yaitu: Kualifikasi penilaian diambil berdasarkan Lima tingkat pembagian, menurut pendapat yaitu: Sangat Berperan dengan bobot 5, Berperan dengan bobot 4, Cukup Berperan dengan bobot 3, Kurang Berperan dengan bobot 2, dan Tidak Berperan dengan bobot 1.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan pemerintah dengan nilai 69,25 % yang berdasarkan berbagai pertanyaan sesuai dengan indikator. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 70 % yang berdasarkan berbagai pertanyaan sesuai dengan indikator di atas. Pemberdayaan generasi muda dengan nilai 68,6 % yang berdasarkan berbagai pertanyaan sesuai dengan indikator di atas. faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Pemerintah terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 69 %, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai 69,67 % dengan kategori berperan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian serta pembahasan pada bab terdahulu maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kategori berperan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh faktor pendukung terdiri dari faktor keturunan, kewibawaan,

kekuasaan dan faktor penghambat terdiri dari kondisi masyarakat, partisipasi masyarakat, fasilitas/peralatan.

E. REFERENSI

- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press .
- Ali, M. (2009). *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Daljoeni. (1998). *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Penerbit Alumni ITB.
- ed, A. S. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Fasli Djalal, D. S. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Ketaren. (2008). *Minyak dan Lemak Pangan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Saparin. (2006). *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan*. Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. (2004). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto. (2002). *Analisis Peran dan Hubungan Keluarga dalam Bisnis Kekeluargaan*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. (2009). *Kekuasaan Pendidikan*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Totok, M. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.